

**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH
DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nanda Muhammad Syah Putra

NPP. 32.0231

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: zamzambae@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaika, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Palembang City, as the capital city of South Sumatra province, has the most waste compared to other districts/cities in South Sumatra Province. It is known that the latest data for 2023 waste generation reached 439,815.66 tons. This is motivated by the limited waste processing facilities in Palembang City and the lack of infrastructure. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and analyze the collaborative governance model in waste management in Palembang City, South Sumatra Province. **Method:** This research uses descriptive qualitative research methods. The theory used to conduct the analysis is the Collaborative Governance theory by Alison Gash and Chris Ansell (2008) which contains 4 main dimensions, namely initial conditions, institutional design, leadership, and collaboration processes. Data collection techniques used interviews, documentation, and direct observation and data triangulation was carried out with a total of 7 informants. Data analysis refers to the concept of Mills and Huberman, 1992, namely Data Reduction, Data Display, and Conclusions: drawing/verifying. **Results:** The results showed that the Palembang City Environment and Forestry Service carried out a collaboration process with the community and also a third party, in this case the Sakura waste bank. In the initial condition dimension, it is known that the Palembang City Environment and Forestry Service realizes the importance of maximizing resources and knowledge so that the government takes collaborative governance steps to be implemented, in the institutional design dimension, it is known that each collaboration actor has good authority or inclusiveness as evidenced by the clear division of tasks of both the government, the private sector, and the community and there is also a clear legal basis, in the leadership dimension, it is known that the head of the department already has an awareness of the importance of socialization to increase community awareness, the dimension of the collaboration process is known to have gone well even though there are several things that need to be improved. **Conclusion:** the application of the collaborative governance model in Palembang City can improve waste management, but requires attention to all dimensions that have been identified. So hopefully in the future it can create a clean and healthy environment for the community.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Public Participation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Palembang, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan, memiliki timbunan sampah paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Diketahui data terakhir tahun 2023 timbunan sampah mencapai 439.815,66 ton. Hal ini dilatarbelakangi

karena Fasilitas pengolahan sampah di Kota Palembang yang masih sangat terbatas serta kurangnya infrastruktur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang dipakai untuk melakukan analisis adalah teori *Collaborative Governance* oleh Alison Gash dan Chris Ansell (2008) yang memuat 4 dimensi utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung serta dilakukan triangulasi data dengan jumlah informan 7 orang. Analisis data penelitian mengacu pada konsep Mills dan Huberman, 1992 yaitu *Data Reduction, Data Display, dan Conclusions: drawing/verifying*. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palembang melakukan proses kolaborasi dengan pihak Masyarakat dan juga pihak ketiga dalam hal ini adalah bank sampah Sakura. Pada dimensi kondisi awal diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palembang menyadari akan pentingnya pemaksimalan sumberdaya dan pengetahuan sehingga pemerintah mengambil langkah *collaborative governance* untuk dilaksanakan, pada dimensi desain kelembagaan diketahui bahwa masing masing aktor kolaborasi memiliki kewenangan atau inklusivitas yang baik terbukti dengan adanya pembagian tugas yang jelas baik pemerintah, pihak swasta, maupun Masyarakat dan juga sudah ada dasar hukum yang jelas, pada dimensi kepemimpinan diketahui bahwa kepala dinas sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat, dimensi proses kolaborasi diketahui sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** penerapan model governance kolaboratif di Kota Palembang dapat meningkatkan pengelolaan sampah, tetapi memerlukan perhatian pada semua dimensi yang telah diidentifikasi. Sehingga harapannya kedepan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat.*

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk diselesaikan (Mustaghfiroh et al., 2020). Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan timbunan volume sampah yang dihadapi terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hanya sekitar 60% dari total sampah yang dihasilkan yang dapat dikelola dengan baik. Sisanya, sekitar 40%, sering kali dibuang sembarangan atau tidak terkelola. Ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai satu-satunya solusi mengakibatkan pencemaran lingkungan, serta masalah kesehatan masyarakat, seperti penyakit pernapasan dan infeksi, yang semakin meningkat (Priatna et al., 2020).

Kota Palembang, sebagai ibu kota provinsi, memiliki timbunan sampah paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sutinah Andaryani et al., 2023). Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, Palembang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah padat perkotaan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekspansi wilayah. Tingginya timbunan sampah di Palembang tidak hanya menjadi masalah estetika kota, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan dan kesehatan Masyarakat. Data tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

No.	Kabupaten/Kota	Timbunan Harian (Ton)	Timbunan Tahunan (Ton)
1.	Kota Palembang	1.204,97	439.815,66
2.	Kabupaten Banyuasin	578,73	211.235,90
3.	Kabupaten OKU	282,14	102.981,68
4.	Kabupaten Lahat	269,61	98.406,85
5.	Kabupaten MUBA	257,93	94.145,47
6.	Kabupaten Musi Rawas	255,50	93.259,27

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2023)

Komposisi sampah di Palembang didominasi oleh sampah organik, yang mencapai sekitar 60%, diikuti oleh sampah plastik yang menyumbang sekitar 20% atau lebih dari 240 ton sampah plastik dihasilkan setiap hari. Masalah pencemaran plastik semakin diperburuk dengan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang ada saat ini kurang memadai (Ikhsandri, 2014). Fasilitas pengolahan sampah di Kota Palembang yang masih sangat terbatas serta kurangnya infrastruktur untuk mendaur ulang sampah organik mengakibatkan banyak sampah yang berakhir di TPA tanpa diolah terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sampah, seperti sistem pengolahan termal atau anaerobik, belum banyak diterapkan. Sistem termal atau anaerobik dinyatakan sebagai konsep terbaharukan yang lebih efektif dan efisien (McCord et al., 2020).

Saat ini diperlukan Langkah matang dalam pengentasan masalah ini. Pemerintah Kota Palembang saat ini mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan seperti keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, kurangnya dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah juga menghambat kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga tanpa kebijakan yang mendukung, kerja sama dapat terhambat (Veriyani et al., 2023). Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam pengelolaan sampah menjadi tantangan lain yang harus dihadapi, kapasitas institusi yang terbatas di tingkat lokal juga menjadi faktor penghambat, di mana pemerintah daerah perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mengelola program kolaboratif. Prinsip ini dilakukan dengan proses partisipasi antara *people, governance*, dan *private sector* (Skowronek & Orren, 2020).

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi penting dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Melalui pendekatan ini, setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan. Langkah ini menekankan bahwa kerjasama tidak hanya sekadar bekerja sama, tetapi juga melibatkan pembagian tugas di antara anggota, di mana setiap orang bertanggung jawab atas tugasnya demi tercapainya tujuan kolektif (Everest et al., 2022). Dijelaskan juga bahwa jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan kerja sama dan kepercayaan di antara anggota Masyarakat. Dengan pelaksanaan ini diharapkan dapat mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan dan meningkatkan partisipasi dalam program-program pengelolaan sampah. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting dalam menangani masalah sampah (Bustomi et al., 2022).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan mengenai sampah sudah menjadi hal yang sangat umum ditemukan di kota besar seperti di Kota Palembang. Penumpukan sampah yang diakibatkan karena padatnya jumlah penduduk menjadi faktor utama pemasok sampah terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Telah banyak Langkah pemerintah untuk mengatasi hal ini, seperti memberikan penyuluhan kepada Masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan seperti taman

kota, sekitar rumah, dan sebagainya seperti yang sudah dikemukakan oleh (Saputra & Azizah, 2023). Akan tetapi belum ada pengamatan tentang bagaimana pelibatan Masyarakat secara langsung dan juga Kerjasama dengan pihak swasta secara bersamaan dalam mengatasi masalah sampah di Kota Palembang. Hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah secara mandiri dan fleksibel (Lambelanova, 2022).

Penelitian terdahulu lebih melihat *collaborative governance* sebagai konsep baru yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terbaru yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti satu data, website terintegrasi, dan juga platform social media milik pemerintah (Yaumil Ahad, 2023). Proses penanganan sampah yang selama ini dilakukan masih *base on governance* atau hanya pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini mengangkat bahwa penanganan sampah juga bisa dilakukan melalui sistem *collaborative governance*.

Berbagai hambatan yang terjadi dalam penanganan masalah sampah di Indonesia kebanyakan bersumber dari aktivitas manusia yang tidak terkendali. Selain itu Masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya mengurangi sampah untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan juga menjadi hambatan penting yang harus menjadi perhatian (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023). Namun beberapa Masyarakat yang membuat kelompok atau komunitas tertentu untuk mengatasi masalah sampah juga mulai ramai bermunculan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Keberadaan yang semakin banyak ini menjadi perhatian penelitian guna melihat bagaimana peran kelompok Masyarakat ini dalam mengelola sampah, mayoritas mereka tergabung dalam kelompok karang taruna desa dan dilibatkan untuk bisa mengelola sampah (Atmadi et al., 2022). Belum ditemukan terkait pihak ketiga yang sudah mandiri dalam pengelolaan sampah sehingga dalam penelitian ini melihat tentang bagaimana pihak ketiga hadir sebagai mitra kolaborasi dalam penanganan sampah di Kota Palembang, dalam hal ini tertuju pada Bank Sampah Sakura.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam pembuatan penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang menarik akan tetapi masih terdapat celah untuk dikaji lebih dalam lagi, baik dari segi *collaborative governance* maupun dalam penyelesaian masalah sampah. Artikel ilmiah karya Karim & Afrijal tahun 2021 berjudul *Collaborative Governance* pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang dengan hasil bahwa pemerintah daerah tidak menerapkan pemerintahan kolaboratif dalam revitalisasi sungai sekanak di kota Palembang, hal tersebut terjadi karena pendekatan yang sangat teknokratis yang digunakan pemerintah dalam kebijakan revitalisasi sungai sekanak (Kariem & Afrijal, 2021). Artikel ilmiah karya Ramadhan Nur Gilang tahun 2025 dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang dengan hasil Kondisi awal telah berjalan baik dengan adanya koordinasi rutin antar pihak untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi. Komponen proses juga berjalan baik karena pemerintah dan swasta telah melaksanakan seluruh tahapan mulai dari koordinasi hingga pelaksanaan. Struktur dan tata kelola berjalan dengan baik, ditandai dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, kontigensi dan kendala belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah (Gilang, 2025). Artikel ilmiah karya Lisa Sri Ningsi dkk dengan judul Strategi *Collaborative Governance* pada Program Ekonomi Kreatif di Kota Palembang dengan hasil bahwa *collaborative governance* pada program ekonomi kreatif di Kota Palembang terealisasi dengan cukup baik (Ningsi et al., 2022). Artikel ilmiah karya Denny Irawan tahun 2018 yang berjudul *Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya) dengan hasil kriteria tata kelola kolaboratif yang belum terpenuhi, terutama pada kriteria akuntabilitas distributif dan akses terhadap sumber daya (Irawan, 2018). Artikel ilmiah karya Putu Nomy Yasintha tahun 2020 dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar dengan hasil pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar masih hanya mengandalkan pemerintah saja, kontribusi dari pihak

swasta masih minimal (Yasintha, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki pandangan baru dalam hal penyelesaian masalah sampah yaitu dengan menggunakan perspektif *collaborative governance*. dimana penyelesaian kasus ini menggunakan perspektif *collaborative governance* belum pernah dilakukan pada penelitian terdahulu terkhusus di Kota Palembang. Selain itu kebaruan penelitian ini juga terletak pada pelibatan aktor swasta berupa Bank Sampah Sakura yang belum pernah dilakukan di penelitian sebelumnya. Utamanya kebaruan ini juga terletak pada lokus yang digunakan yaitu Kota Palembang yang tentu memiliki karakteristik tersendiri. Terakhir penggunaan konsep *collaborative governance* oleh (Ansell & Gash, 2008) ini juga belum pernah dilakukan sebagai pisau analisis kolaborasi dalam penanganan sampah di Kota Palembang.

1.5 Tujuan

Tujuan dari terciptanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif. Model ini dipandang paling fleksibel karena memungkinkan terjadinya perubahan ditengah pelaksanaan penelitian, sehingga dapat diarahkan pada tujuan utama penelitian (Simangunsong, 2017). Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun informan penelitian ini meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Kepala Seksi Fasilitas Kebersihan, Petugas Pelaksana Lapangan, Kepala Bank Sampah Sakura, dan Masyarakat. Adapun informan kunci adalah informan yang memiliki pengetahuan luas dan dianggap paling paham atas sesuatu yang dibahas (Sugiyono, 2023) dalam hal ini informan kuncinya adalah Kepala Dinas dan juga Kepala Seksi Fasilitas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan selama 19 hari mulai tanggal 6 – 25 januari 2025 berlokasi di Kota Palembang terutama di Dinas Lingkungan Hidup, Lokasi Bank Sampah, dan di lingkungan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menelaah tentang optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui konsep *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash tahun 2008 dengan melihat empat dimensi yang dianalisis yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang memfasilitasi, dan proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008) dan dibahas sebagai berikut :

3.1 Kondisi Awal

Permasalahan sampah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan tantangan

serius yang memerlukan pendekatan kolaboratif. *Collaborative governance* melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mengatasi masalah ini. Tantangan awal seperti keterbatasan anggaran dan resistensi masyarakat terhadap perubahan kebiasaan harus diatasi agar *collaborative governance* dapat diterapkan secara efektif sehingga dibutuhkan juga sumberdaya yang memadai. Sumber daya mencakup infrastruktur yang memadai, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan fasilitas daur ulang, serta anggaran yang cukup dan sumber daya manusia (SDM) terlatih untuk menjalankan program pengelolaan sampah. Di sisi lain, pengetahuan mencakup pemahaman tentang teknik pemilahan, daur ulang, dan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian masing-masing. Dengan memadukan sumber daya yang tepat dan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang bahwa Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan masalah bersama yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, produksi sampah di Palembang mencapai sekitar 1.504,97 ton per hari, dengan tingkat pengelolaan yang sudah mencapai 75,53% melebihi target nasional. Namun, pengurangan sampah masih berada di angka 21,30%, yang masih di bawah target nasional sebesar 26%. Ia menyatakan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah tingginya volume timbulan sampah akibat pertumbuhan populasi yang pesat. Pernyataan tersebut didukung dengan data Kota Palembang yang mengalami peningkatan volume sampah di tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2

No	Tahun	Produksi Sampah Harian (Ton)	Produksi Sampah Tahunan (Ton)	Jenis Sampah
1	2023	1.200	438.000	Organik : 720 Ton
				Plastik : 300 Ton
				Kertas : 120 Ton
				Lainnya (Logam, kaca, dll) : 60 Ton
2	2024	1.500	547.500	Organik : 900 Ton
				Plastik : 450 Ton
				Kertas : 120 Ton
				Lainnya(Logam,kaca,dll) : 30 Ton

Sumber : DLHK Kota Palembang, 2024

Secara keseluruhan, kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang sudah dilakukan melalui berbagai inisiatif dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih efektif, diperlukan peningkatan integrasi dan sinergi antar berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

3.2 Desain Kelembagaan

Menurut Haryono (2012) menyatakan bahwa kelembagaan dapat dibedakan dari organisasi dengan memperhatikan interaksi formal dan non-formal, serta berbagai pola hubungan yang terjadi dalam

masyarakat. Ia juga mencantumkan prinsip penting dalam pengembangan kelembagaan, seperti partisipatif, efisiensi, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Dalam dimensi desain kelembagaan terdapat indikator partisipasi inklusif dengan temuan bahwa dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Palembang melibatkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program dan kerja sama dengan sektor swasta dapat menciptakan solusi inovatif. Dengan menerapkan prinsip partisipasi inklusif, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Palembang menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang juga menyatakan bahwa partisipasi inklusif ini juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, karena masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara-cara pengelolaan sampah yang baik. Inklusivitas ini juga tergambar dari kejelasan pembagian tugas seperti, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah, seperti penerapan konsep *3R (Reduce, Reuse, Recycle)*, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator dalam implementasi kebijakan tersebut serta menyediakan pelatihan bagi masyarakat dan bank sampah, Bank sampah berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan industri daur ulang, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam pengelolaan sampah; dengan melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga dan berpartisipasi dalam program-program lingkungan.

Indikator kedua berkaitan dengan aturan dasar. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat aturan dasar yang jelas yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya menjadi dasar aturan yang jelas dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Perda ini mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Mereka merasa bahwa aturan ini penting untuk mendefinisikan peran pemangku kepentingan dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat. Namun, mereka juga menyoroti perlunya pemahaman dan edukasi mengenai aturan tersebut agar bisa diterapkan secara efektif dalam praktik sehari-hari.

Pada indikator ketiga yaitu transparansi proses mengungkapkan hasil bahwa transparansi dalam proses pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik selain itu juga ditekankan pada pentingnya akses informasi yang jelas untuk semua pemangku kepentingan agar dapat membangun kepercayaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, transparansi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengelolaan sampah di Kota Palembang.

3.3 Kepemimpinan yang Memfasilitasi

Dimensi kepemimpinan yang memfasilitasi mengungkapkan hasil bahwa Pemimpin kolaboratif menggunakan pendekatan fasilitatif untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor informal, dan masyarakat. Kepemimpinan ini juga terlihat dalam integrasi sektor informal ke dalam sistem pengelolaan sampah dan pelibatan masyarakat melalui edukasi pemilahan sampah. Dengan menyusun Grand Design Sistem Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dalam RPJMD dan Renstra Daerah, serta menggunakan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan, mereka berupaya mencapai target yang terukur. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan seperti koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur pengolahan sampah skala besar masih menjadi kendala. Solusi yang diambil termasuk optimalisasi kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penerapan skema insentif berbasis

kinerja bagi pihak-pihak yang terlibat. Contoh konkret keberhasilan terlihat dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Palembang dengan Bank Sampah, yang berhasil meningkatkan partisipasi 15 kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu.

Tabel 3

No	Nama Kelompok	Pimpinan Kelompok	Alamat	Jumlah Anggota
1.	Kelompok Hijau	Ahmad Rizal	Jl. Merdeka	15
2.	Sahabat Lngkungan	Siti Aminah	Jl. Kebangkitan	12
3.	Peduli Sampah	Budi Santoso	Jl. Cendana	20
4.	Komunitas Daur Ulang	Rina Lestari	Jl. Pahlawan	10
5.	Bersih Kota	Dedi Supriyadi	Jl. Sejahtera	18
6.	Generasi Peduli Lingkungan	Fitriani	Jl. Bunga	22
7.	Eco Warriors	Andi Prabowo	Jl. Anggrek	14
8.	Mitra Hijau	Lila Sari	Jl. Bintaro	16
9.	Komunitas Bersih	Rudi Hartono	Jl. Angkatan 66	21
10.	Keluarga Peduli Sampah	Yuni Astuti	Jl. Suka Damai	17
11.	Lingkungan Sehat	Toni Setiawan	Jl. Pelangi	13
12.	Sahabat Alam	Rina Wulandari	Jl. Sukma	15
13.	Komunitas Cinta Lingkungan	Arief Rahman	Jl. Way Hitam	12
14.	Daur Ulang Mandiri	Siti Nurjanah	Jl. Demang	20
15.	Peduli Kebersihan	Fajar Prasetyo	Jl. Dempo	14

Sumber : DLHK Kota Palembang

Secara keseluruhan, kepemimpinan kolaboratif ini menunjukkan bagaimana pendekatan partisipatif, regulasi terintegrasi, dan sinergi multistakeholder dapat mentransformasi sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat Palembang. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan program edukasi, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pemilahan dan pengelolaan sampah. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia masih ada. Keduanya berharap dengan memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kapasitas operasional Dinas Kebersihan, permasalahan sampah dapat dikelola lebih baik, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

3.4 Proses Kolaborasi

Dimensi proses kolaborasi menghasilkan temuan bahwa sistem kolaborasi dijalankan secara bersama sama sehingga menghasilkan pemerintahan yang dipercaya. Dalam rangka membangun kepercayaan, konsep *collaborative governance* untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Palembang dilaksanakan melalui dialog terbuka, komitmen bersama, dan penguatan hubungan antar pemangku kepentingan. Kepercayaan dapat tumbuh melalui komunikasi efektif, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta transparansi dalam proses kolaborasi. Strategi seperti integrasi sektor informal, peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi, dan

penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Dialog terbuka dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan agar semua pihak dapat berkomitmen untuk berkolaborasi. Integrasi sektor informal dan partisipasi masyarakat melalui edukasi tentang pengelolaan sampah juga diperlukan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan kolaboratif yang mendukung sinergi antar pihak dianggap sebagai langkah strategis. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Palembang dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan

Proses kolaboratif dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Palembang, khususnya melalui Bank Sampah Sakura, menunjukkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Bank Sampah Sakura berperan aktif dalam membantu program pemerintah untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Melalui sistem tabungan sampah, masyarakat dapat menukarkan sampah yang mereka kumpulkan menjadi uang, sehingga memberikan tambahan pendapatan meskipun belum sepenuhnya memadai. Program ini juga memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga. Mekanisme pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga bank sampah dimulai dengan pemilahan sampah di tingkat rumah. Sampah organik, seperti sisa makanan, dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah non-organik, seperti plastik dan kertas, bisa dijual ke bank sampah atau didaur ulang. Selain itu, bank sampah juga dapat memperoleh pendapatan dari layanan pengumpulan sampah terpilah dan kontrak dengan pemerintah atau perusahaan untuk mengelola limbah mereka

Komitmen terhadap proses dalam *collaborative governance* merujuk pada dedikasi semua pihak untuk menjalankan tahapan kolaborasi secara konsisten dan terstruktur. Dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang, komitmen ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Elemen-elemen kunci dari komitmen ini meliputi, membangun kepercayaan, mencapai kesepakatan bersama, serta pemahaman yang sama tentang tujuan pengelolaan sampah. Meskipun kolaborasi sudah berjalan, tantangan seperti kurangnya kepercayaan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih ada.

pentingnya membangun jaringan komunikasi yang baik antar semua pihak juga menjadi kunci untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat. Dengan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan sampah, kepercayaan akan terbangun dan partisipasi akan meningkat. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor yang lebih intensif, pengelolaan sampah di Kota Palembang dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan kualitas hidup Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan ada, dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang solid, solusi untuk masalah sampah dapat dicapai secara efektif

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap topik utama tentang bagaimana pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan sistem *collaborative governance* dalam mengatasi masalah sampah. Secara umum sistem *collaborative governance* sudah dilaksanakan sebagai langkah utama dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Palembang, bersama dengan Masyarakat dan bank sampah Sakura pelaksanaan kolaborasi ini mampu terlaksanakan, selain itu secara tidak langsung sektor bank sampah ini juga mampu mendokrak kegiatan ekonomi

alternatif yaitu melalui kegiatan industri pengolahan (Rahardjanto, 2020). Namun dari segi ketersediaan sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia masih belum tersedia dengan optimal sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Selain itu temuan utama lain yang menjadi perhatian adalah adalah pelibatan Masyarakat secara langsung dalam proses kolaborasi. Langkah awal dari kegiatan ini adalah dengan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah yang dihasilkan terutama pada sektor rumah tangga yang selanjutnya direalisasikan dalam bentuk Bank Sampah. Temuan ini sama halnya dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa Masyarakat didorong untuk mengetahui tentang pengelolaan sampah sehingga nantinya dapat bernilai ekonomis tinggi (Asteria & Heruman, 2016). Sehingga penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya.

Hal lain yang disorot pada penelitian ini terdapat pada sistem kerja sama yang terjalin antara pemerintah, Masyarakat, dan Pihak ketiga dalam hal ini adalah Bank Sampah Sakura yang mengedepankan tujuan bersama diatas tujuan pribadi yaitu terselesaikannya permasalahan sampah di Kota Palembang. Pihak ketiga disini yang seharusnya berorientasi tinggi pada keuntungan namun diarahkan untuk menjadi mitra pemerintah yang bernilai tanda jasa tanpa pamrih. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menghasilkan temuan bahwa pihak ketiga dilibatkan dalam penyelesaian masalah sampah namun bukan sebagai mitra kolaborasi melainkan sebagai pihak ketiga murni yang membeli sampah terutama sampah kaca untuk diolah dan dijual kembali dengan nilai ekonomis tinggi kepada Masyarakat (Auliani, 2020).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pada penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Palembang seperti rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Koordinasi yang buruk antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pengembangan infrastruktur juga menjadi tantangan, dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengampu utama.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian terkait Model *Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Palembang. Secara umum Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan proses kolaborasi yang mampu berjalan dengan komunikasi yang baik antara pemerintah, Masyarakat, dan pihak swasta, desain kelembagaan yang juga sudah terbentuk sehingga sudah terlihat efek positif dengan mulai terselesaikannya masalah sampah di Kota Palembang. Meskipun disini lain ditemukan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan awal yang harus diatasi agar model kolaboratif dapat berjalan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Adapun penelitian ini masih belum sempurna dan memiliki banyak keterbatasan seperti keterbatasan waktu penelitian, selain itu infrastruktur lokus yang masih memiliki kekurangan terutama infrastruktur teknologi yang minim sehingga menjadi kesulitan tersendiri dalam melakukan observasi, hal lain yang menjadi keterbatasan juga dirasakan penulis dari segi anggaran dan biaya penelitian yang masih kurang dalam mencapai target tinggi yang diharapkan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih mengkaji mengenai bagaimana karakter Masyarakat dalam menerima himbuan pemerintah untuk sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini disarankan karena

dalam penelitian ini penulis belum mampu mengungkap apakah karakter Masyarakat di daerah berbeda memiliki respon yang sama terkait edukasi sadar akan pengelolaan sampah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan karunianya kepada penulis. Ungkapan kebahagiaan juga ditujukan kepada Ayah dan Bunda yang telah berjasa mendidik penulis, tidak lupa juga kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, seluruh dosen yang telah memberikan Pelajaran dan ilmu kehidupan, terkhusus kepada Ibu Siti Zulaika selaku dosen pembimbing yang secara sabar dan tekun membimbing penulis dalam penyelesaian karya ini. Terakhir ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada seluruh rekan rekan sejawat yang selalu memberikan motivasi berharga.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 8.
- Atmadi, G., Jumianto, S., Gunawan, I., Rahayu, K. M., Sepang, N. R., & Elfidasari, D. (2022). Pemberdayaan Karang Taruna dalam Mengoptimalkan Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot BSF di Desa Cikidang Sukabumi. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, 2(1), 119. <https://doi.org/10.36722/psn.v2i1.1615>
- Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidas*, 1(5), 330–338. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i5.80>
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Everest, M. E., Izmya, H. M., Khalid, M., Agristya, S. H., & Sudarmono, S. (2022). The Utilization of Sultan Ground: Reflection of Asymmetrical Decentralization Reinforced by the Sultanate of Yogyakarta. *Proceedings of the 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay) (ASBAM 2021)*, 660(Asbam 2021), 480–485. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.067>
- gilang, ramadhan nur ; manar, D. G. (2025). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 1, 47–53.

- Ikhsandri. (2014). Kajian Infrastruktur Pengolahan Sampah di Kawasan Berkembang Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 2(1), 130–138.
- Irawan, D. (2018). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Kariem, M. Q., & Afrijal, A. (2021). Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3), 107–114. <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1777>
- Lambelanova, R. (2022). Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Buku Literatur IPDN Tahun 2022*, 5(3), 248–253.
- Madya Putra Yaumil Ahad, & Nugraha Barsei, A. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- McCord, A. I., Stefanos, S. A., Tumwesige, V., Lsoto, D., Kawala, M., Mutebi, J., Nansubuga, I., & Larson, R. A. (2020). Anaerobic digestion in Uganda: Risks and opportunities for integration of waste management and agricultural systems. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 35(6), 678–687. <https://doi.org/10.1017/S1742170519000346>
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 279. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Ningsi, L. S., Kardila, Y., Mandriana, D., Syaban, R., & Panorama, M. (2022). STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM EKONOMI KREATIF TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA PALEMBANG. *KABILAH: Journal of Social Community*, 7(2 SE-Articles), 104–112. <https://doi.org/10.35127/kbl.v7i2.6257>
- Priatna, L., Priatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. *Cakrawala Hukum*, 22(1), 73–79.
- Rahardjanto, T. (2020). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Jambi. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 41–50. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.966>
- Saputra, H., & Azizah, Y. W. (2023). Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Taman Kambang Iwak di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal*, 09(2), 1109–1114. <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Skowronek, S., & Orren, K. (2020). The Adaptability Paradox: Constitutional Resilience and Principles of Good Government in Twenty-First-Century America. *Perspectives on Politics*, 18(2), 354–369. <https://doi.org/10.1017/S1537592719002640>

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Sutinah Andaryani, Dwikurniawati, I. U., & Rusdi, R. (2023). Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 47–58. [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12551](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12551)

Veriyani, V., Parahita, B. N., & Trinugraha, Y. H. (2023). Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Ruang Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 242. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8278>

Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>

